

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBILO KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Muhamad Habib
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
muhammadhabib@gmail.com

Abstrak

The development of the tourism sector is an important strategy in encouraging national and regional economic growth. The Government of Indonesia through various policies, including Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, has given broad authority to villages to manage local potential independently, including the development of tourist villages. This study aims to describe the role of the Village Government in the development of Sebilo Tourism Village, Pino District, South Bengkulu Regency. Sebilo Village is one of the pioneer tourism villages that carries the concept of religious, natural, cultural, and culinary history. Through the support of village funds and local government grants, as well as the initiation of the formation of Tourism Awareness Groups, the Sebilo Village Government seeks to optimize the potential of local tourism to improve the welfare of the community. This research shows that collaboration between the village government and the community, especially the youth, is the key in transforming Sebilo Village from an ordinary bathing location to an attractive tourist destination. With a participatory approach and based on local potential, the development of tourism villages is expected to be able to encourage sustainable village economic growth and become a model for the development of tourism villages in other regions.

Keywords: Village Government, Tourism Village, Community Empowerment, Sebilo, South Bengkulu.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah. Pariwisata dipilih sebagai sektor strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015–2019, yang menyatakan bahwa kontribusi nyata sektor pariwisata menjadikan sektor ini memiliki posisi penting dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama bagi negara dengan kekayaan aset kepariwisataan seperti Indonesia (Nurmayasari, 2017).

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 19 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang empat jenis kewenangan desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan tersebut, desa memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam bidang kepariwisataan.

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan pedesaan, sehingga desa menjadi kekuatan utama dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Perhatian pemerintah terhadap

desa diwujudkan melalui program Nawa Cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, termasuk dalam pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi lokal yang diarahkan pada pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, hingga kini tantangan pembangunan desa masih cukup besar. Berdasarkan data Potensi Desa Tahun 2014 yang mencakup 511 kabupaten/kota, terdapat 73.709 desa diseluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.838 desa atau sekitar 49,98% masih berstatus tertinggal, dan 2.047 desa lainnya atau sekitar 2,78% tergolong sangat tertinggal. Sementara itu, desa berkembang hanya berjumlah 34.824 atau sekitar 47,2%. Data ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari desa di Indonesia belum sepenuhnya berkembang, sehingga menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal.

Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah daerah terus mendorong pembangunan desa wisata sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Salah satu desa wisata yang menjadi andalan di wilayah ini adalah Desa Sebilo di Kecamatan Pino. Desa ini telah ditetapkan sebagai desa wisata rintisan dengan dukungan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang diresmikan pada 28 Desember 2016. Wisata yang ditawarkan meliputi wisata sejarah religi, alam, budaya, dan kuliner. Fasilitas seperti arung jeram, private camp, panahan, lempar kapak, serta sarana penunjang lainnya telah tersedia untuk mendukung daya tarik wisata. Inisiatif pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Sebilo mencerminkan peran aktif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Dana desa serta hibah pemerintah daerah menjadi sumber utama pendanaan. Transformasi Desa Sebilo dari lokasi pemandian biasa menjadi destinasi wisata menunjukkan efektivitas peran pemerintah desa dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sebilo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ilmiah mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata, serta menjadi referensi dan bahan kajian akademik dalam bidang pariwisata. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pengelolaan potensi wisata desa yang dapat diterapkan secara langsung oleh pemerintah desa maupun masyarakat, khususnya di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Putri, Darwis, dan Taftazani (2017) menyoroti belum optimalnya peran perempuan dalam pengembangan desa wisata di Cianjur. Sementara itu, Herayomi (2016) dalam penelitiannya mengenai peran pemuda dalam desa wisata Kebonagung, menemukan bahwa pemuda lebih banyak berperan sebagai objek daripada subjek pengembangan. Penelitian ini memiliki fokus berbeda karena menitikberatkan pada peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pengembangan desa wisata, khususnya di Desa Sebilo.

Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely, yang membagi peran pemerintah menjadi empat, yaitu sebagai koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Sebagai koordinator, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan dan mengkoordinasikan sektor pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan

melalui pelatihan, penyediaan sarana, dan dukungan pendanaan. Sebagai stimulator, pemerintah berperan dalam memicu tumbuhnya aktivitas wisata melalui strategi dan penyediaan infrastruktur. Sedangkan sebagai motivator, pemerintah memberikan semangat dan dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar terus berkontribusi dalam pembangunan pariwisata.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan empat peran pemerintah tersebut yang kemudian dikaitkan dengan implementasi nyata dalam pengembangan desa wisata, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan infrastruktur, produk wisata, sumber daya manusia, hingga strategi promosi. Dengan kerangka tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah desa mengambil peran strategis dalam mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi berbasis wisata di Desa Sebilo.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sebilo di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian deskriptif kualitatif ini tidak bertujuan untuk mengukur dengan angka, tetapi lebih menekankan pada pemaknaan, pemahaman, dan penggambaran secara menyeluruh terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan data dalam bentuk narasi yang diperoleh langsung dari lapangan dan dianalisis untuk menemukan makna dan pola hubungan yang relevan.

Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Sebilo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Desa Sebilo merupakan desa yang telah menginisiasi pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dan telah memiliki kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai wadah partisipasi masyarakat. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh elemen yang berperan dan terlibat langsung dalam proses pengembangan

desa wisata, seperti aparat pemerintah desa, pengurus Pokdarwis, masyarakat pelaku usaha wisata, serta tokoh masyarakat. Namun karena sifat penelitian ini adalah kualitatif, penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi di lokasi dan wawancara dengan informan yang dipilih, antara lain kepala desa, anggota Pokdarwis, serta warga yang aktif dalam pengembangan wisata desa. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen pendukung seperti arsip desa, laporan kegiatan Pokdarwis, data demografi desa, foto kegiatan, serta catatan atau dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati aktivitas tanpa terlibat langsung dalam kegiatan desa wisata. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan kunci dan informan tambahan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan validasi data, berupa pengumpulan dokumen tertulis, foto, dan arsip pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Proses analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Analisis data terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan merangkum data yang relevan untuk

fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terorganisasi dan sistematis untuk mempermudah dalam melihat hubungan antar kategori temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung dan dikukuhkan kembali setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Sebilo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut.

HASIL

Bagian hasil penelitian dan atau pembahasan berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis.

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Sebilo, Kabupaten Bengkulu Selatan, ditemukan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengembangan Desa Wisata Sebilo. Peran tersebut terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

Peran Pemerintah Desa dalam Tahap Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sebilo bertindak sebagai stimulator dan motivator dalam pengembangan wisata desa. Sebagai stimulator, Pemerintah Desa aktif menggerakkan inisiatif pembangunan dengan mengajukan proposal hingga berhasil memperoleh dana hibah sebesar Rp15.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti warung kuliner, tempat parkir, kamar mandi umum, gazebo, dan fasilitas wisata lainnya. Hal ini sejalan dengan teori peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata yang dikemukakan oleh Inskeep (1991), di mana pemerintah lokal memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum pendukung.

Selain itu, Pemerintah Desa Sebilo juga menyediakan perlengkapan tambahan seperti alat outbound, perlengkapan camping, ayunan, mushola, serta media promosi digital melalui Instagram dan website. Temuan ini mendukung hasil penelitian Suwantoro (2004) yang menyebutkan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya memerlukan pengelolaan fisik tetapi juga promosi yang efektif melalui berbagai media.

Sebagai motivator, Pemerintah Desa Sebilo melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, antara lain melalui sosialisasi, himbuan kebersihan, pelatihan rescue, serta keterlibatan langsung perangkat desa dalam kegiatan gotong royong. Praktik ini memperkuat konsep *community-based tourism* (CBT) sebagaimana dijelaskan oleh Goodwin dan Santilli (2009), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam pelaksanaan, seperti belum tersedianya tempat pembuangan akhir sampah dan menurunnya intensitas kegiatan penyadaran masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peran Pemerintah Desa sudah berjalan, masih diperlukan upaya penguatan dalam aspek pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan.

Peran Pemerintah Desa dalam Tahap Evaluasi

Hasil Pemerintah Desa Sebilo melaksanakan evaluasi secara rutin satu kali dalam setahun. Evaluasi ini melibatkan Pokdarwis dan unsur masyarakat, serta dilakukan melalui rapat formal dan musyawarah informal. Evaluasi meliputi aspek kesiapan lokasi wisata, pelayanan pengunjung, efektivitas promosi, pengelolaan fasilitas umum, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan dana desa.

Temuan ini sesuai dengan teori evaluasi program menurut Stufflebeam (2003) yang mengemukakan bahwa evaluasi yang efektif harus melibatkan stakeholders, bersifat partisipatif, dan digunakan untuk perbaikan program ke depan.

Dalam hasil evaluasi, ditemukan bahwa fasilitas umum seperti toilet, papan informasi, dan area parkir masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Desa juga memaparkan rancangan kegiatan ke depan dengan fokus pada perbaikan fasilitas yang sudah ada, walaupun hingga saat penelitian berlangsung belum terdapat agenda penambahan fasilitas baru.

Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa Pemerintah Desa Sebilu mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana pemasukan dan pengeluaran dana desa dipaparkan secara terbuka. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) terkait pengelolaan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya akuntabilitas publik.

Perbandingan dengan Penelitian Sejenis

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, seperti studi oleh Handayani (2021) di Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta, terdapat kesamaan dalam hal peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi masyarakat. Namun, perbedaan ditemukan pada skala pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi. Desa Sebilu masih terbatas pada

penggunaan media sosial, sementara di Pentingsari telah memanfaatkan platform digital berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sebilu masih memiliki peluang pengembangan, terutama dalam peningkatan kapasitas digitalisasi pengelolaan wisata.

Pemaknaan Hasil Penelitian

Jika Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Sebilu dalam pengembangan desa wisata memiliki arti positif, baik dari sisi peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan tata kelola wisata berbasis komunitas. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, peningkatan fasilitas umum, serta konsistensi kegiatan pembinaan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Sebilu sejalan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Sebilu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sebilu memegang peran yang sangat penting dalam seluruh proses pengembangan desa wisata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemerintah Desa berperan sebagai koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sebagai koordinator, Pemerintah Desa berhasil mengoordinasikan unsur internal maupun eksternal guna menyatukan visi dan strategi pengembangan wisata yang selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana serta mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan potensi lokal. Sebagai stimulator, Pemerintah Desa menggerakkan pembangunan sarana wisata dan memotivasi warga untuk memanfaatkan media sosial dalam promosi. Sebagai motivator, Pemerintah Desa meningkatkan semangat partisipatif masyarakat melalui edukasi, kerja bakti, pelatihan teknis, serta keteladanan dari aparat desa. Evaluasi rutin yang dilakukan setiap tahun turut memastikan keberlanjutan dan perbaikan pengelolaan wisata Desa Sebilu. Secara keseluruhan, pengembangan desa wisata ini telah membawa dampak positif bagi masyarakat, di antaranya terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kesadaran terhadap

potensi budaya lokal, serta berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif, meskipun masih terdapat kekurangan seperti pengelolaan kebersihan yang belum optimal dan kurangnya intensitas kegiatan edukasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kanisius. 2001. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Rozaki, Abdur, dan Resti Rinandra. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi: Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU NO. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suratmo, Gunarwan. 2002. *Panduan Penelitian Multidisiplin*. Institut Pertanian Bogor Press.
- Suryadana, Liga dan Vanny Octavia. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah* Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Widjaja, Haw. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Januar, Jani. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Konsep, dan Implementasi*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Simanungkalit, dkk. 2012. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Damayanti, E., M. S. Soeaidy, dan H. Ribawanto. 2015. Strategi *Capacity Building* Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(3): 464-470.
- Zakaria, Faris dan R. D. Suprihardjo. 2014. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits*. 3(2): 245-249.
- Arifin, Ahmad Z. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang*. Tanjungpinang: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Damayu, Wike T. 2015. *Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*. Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.